

Jurnal Of Development Economic and Digitalization

Vol. 2, No. 2, 2023, pp. 1-20
P-ISSN 2963-6221 – E-ISSN 2962-8520

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* ATAS BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2016 – 2020

Anissa Mutiara Dewi¹, Renea Shinta Aminda²
¹anissamutiara@upnvj.ac.id, ²renea.shinta.rsa@gmail.com
¹UPN Veteran Jakarta, ²UPN Veteran Jakarta

Received: 20 Juli 2023

Published: 30 Agustus 2023

Abstrak

Kebijakan penyaluran anggaran perimbangan dilihat secara positif, tetapi jika dilihat kembali ternyata kebijakan tersebut dapat membuat disinsentif atau demotivator pada berbagai pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan kemalasan fiskal dan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Teori *flypaper effect* dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi inefisiensi pada dana transfer. Penting untuk mengidentifikasi adanya *flypaper effect* guna mencegah dana transfer menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah, karena jika tidak dilakukan, potensi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh dari PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh serta untuk melihat ada atau tidaknya *flypaper effect* atas belanja daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil melalui BPS Aceh tentang PAD, DAU, DAK, DBH, serta belanja daerah pada 2016 – 2020. Regresi data panel sebagai acuan analisis dengan jumlah sampel sebanyak 115 Obs. Temuan studi memperlihatkan apabila belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Aceh dipengaruhi secara signifikan oleh PAD, DAU, DAK, dan DBH. Penelitian ini juga memperlihatkan apabila DAU, DAK, dan DBH menyebabkan *flypaper effect* atas belanja daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah; PAD; DAU; DAK; DBH; *Flypaper Effect*.

Abstract

The balanced budget distribution policy is seen positively, but if we look again it turns out that this policy can create a disincentive or demotivator for various regional governments, which can result in fiscal laziness and high dependence on the central government. The flypaper effect theory can be used to identify indications of inefficiency in transfer funds. It is important to identify the existence of a flypaper effect to prevent transfer funds from becoming the main source of financing regional expenditure, because if this is not done, regional potential cannot be utilized optimally. This research aims to determine the influence of PAD, DAU, DAK, and DBH on Regional Expenditures of Regency/City governments in Aceh Province and to see whether or not there is a flypaper effect on regional expenditure. This research uses secondary data taken through BPS Aceh regarding PAD, DAU, DAK, DBH, and regional expenditure in 2016 - 2020. Panel data regression as a reference for analysis with a sample size of 115 Obs. The study findings show that regional spending in all districts/cities in Aceh is significantly influenced by PAD, DAU, DAK and DBH. This research also shows that DAU, DAK, and DBH cause a flypaper effect on regional spending..

Keywords: *Regional Expenditure; PAD; DAU; DAK; DBH; Flypaper Effect.*

1. PENDAHULUAN

Belanja daerah yang adalah estimasi beban belanja suatu daerah yang akan didistribusikan secara merata dan adil sehingga bisa diukur serta dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa dibedakan, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik (Utami & Iskandar, 2020). Peningkatan belanja daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah suatu daerah pada era otonomi daerahnya diberdayakan secara mandiri untuk mengelola PAD guna mendukung belanja daerah. Namun, pusat juga memiliki kewajiban dalam membantu masing – masing daerah dalam hal memperkecil fiscal gap melalui mekanisme fiskal transfers (penyaluran dana perimbangan) berupa DAU, DAK, dan DBH. Kebijakan penyaluran anggaran perimbangan dilihat secara positif, tetapi jika dilihat kembali ternyata kebijakan tersebut dapat membuat disinsentif atau demotivator pada berbagai pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan kemalasan fiskal dan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan kapasitas daerahnya karena terus berharap atau bergantung pada relokasi atau pendanaan pemerintah pusat untuk memenuhi biaya belanja daerahnya (Chadiza & Syahnur, 2022). Teori *flypaper effect* dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi inefisiensi pada dana transfer (Septriani, Armelly, Ekaputri, & Pasaribu, 2020). Menurut Oates, *flypaper effect* adalah kondisi dimana posisi transfer lebih kecil dibandingkan belanja daerah daripada pendapatannya sendiri (Oates, 1999). *Flypaper effect* terjadi saat pemerintah daerah menerima *grant*, lalu digunakan untuk meningkatkan belanjanya tanpa meningkatkan pendapatan asli.

Tabel 1. Kontribusi PAD, DBH, DAU, dan DAK pada 4 Provinsi dengan Belanja Daerah (ribu rupiah) Terbesar Se-Indonesia Tahun 2016 – 2020

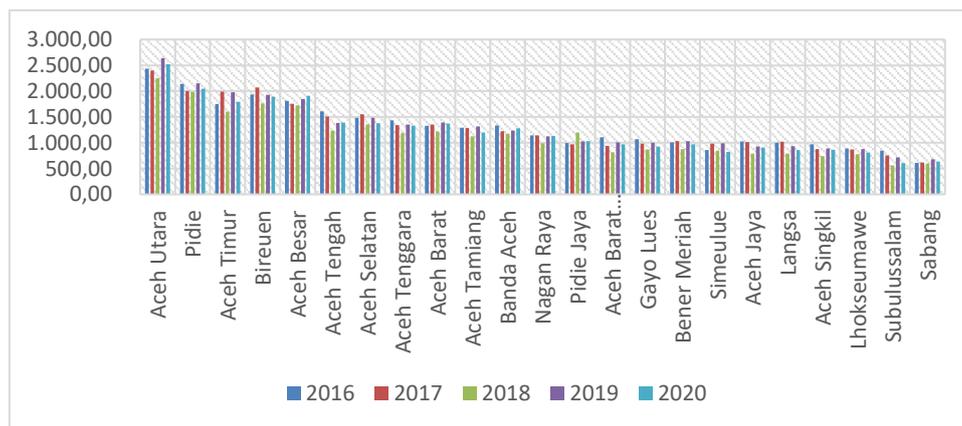
		Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah	Aceh
2016	BD	27,621,964,467	23,859,953,926	19,354,374,825	19,808,221,473
	%PAD	62%	66%	60%	10%
	%DBH	6%	8%	5%	1%
	%DAU	5%	7%	10%	6%
	%DAK	28%	23%	27%	1%
2017	BD	32,706,749,485	28,878,134,636	22,884,713,019	13,832,848,610
	%PAD	55%	60%	55%	16%
	%DBH	6%	6%	4%	2%
	%DAU	9%	13%	16%	15%
	%DAK	28%	24%	29%	11%
2018	BD	33,333,824,962	30,662,093,022	24,478,632,557	12,306,306,187
	%PAD	59%	60%	56%	19%
	%DBH	5%	9%	3%	2%
	%DAU	9%	12%	15%	17%
	%DAK	28%	22%	27%	12%
2019	BD	35,833,086,126	13,967,109,633	26,151,062,842	14,672,122,195
	%PAD	59%	138%	55%	18%
	%DBH	4%	17%	2%	1%
	%DAU	9%	29%	14%	16%
	%DAK	28%	54%	27%	12%
2020	BD	38,127,531,749	32,286,757,637	25,651,740,350	13,242,212,802

%PAD	49%	56%	53%	19%
%DBH	5%	7%	3%	4%
%DAU	8%	11%	13%	15%
%DAK	28%	24%	29%	13%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Menurut BPS, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan presentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera sejak tahun 2002. Dalam menangani kemiskinan yang ada, pemerintah daerah Aceh meningkatkan spending belanja guna menggerakkan ekonomi aceh secara keseluruhan. Hal ini terbukti besarnya belanja daerah aceh dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 Aceh menempati posisi kelima sebagai provinsi dengan belanja daerah terbesar se-Indonesia. Namun diantara kelima provinsi tersebut diduga kuat terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Aceh. Fenomena tersebut didasari oleh dominannya penggunaan dana transfer yang diwakilkan oleh DAU, DAK, dan DBH dalam membiyai pembangunan Provinsi Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Provinsi Aceh masih sangat bergantung kepada dana transfer, yang memungkinkan membuat perilaku asimetris di pemerintah daerah yang menimbulkan indikasi inefisiensi pada dana transfer sehingga menyebabkan *flypaper effect* pada belanja daerah tesebut.

Grafik 1. Belanja Daerah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022.

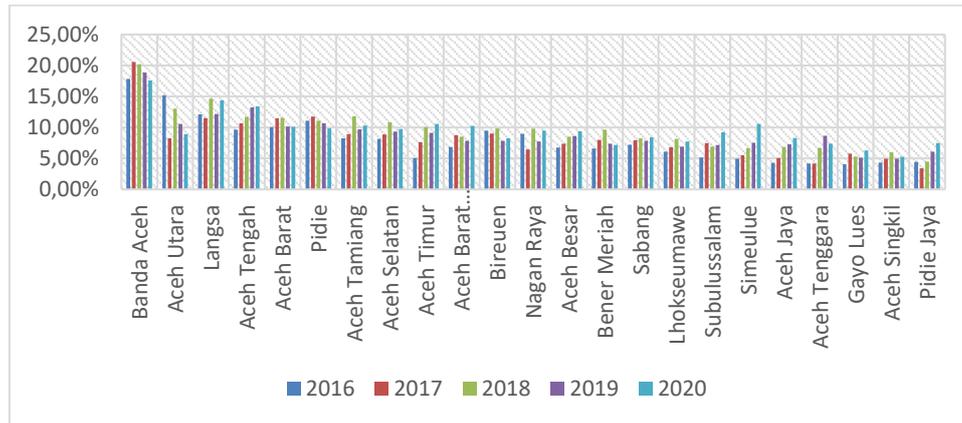
Dalam rangka melaksanakan kebutuhan publik, pemerintah membelanjakan uang untuk membuat pembiayaan, dimana kemudian disebut sebagai belanja daerah. Pada grafik di atas terlihat bahwa belanja pemerintah Provinsi Aceh tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 hampir seluruh belanja daerah kabupaten/kota menurun, lalu karna adanya covid-19 pada 2019 membuat belanja daerah semua kabupaten/kota meningkat hingga akhirnya menurun kembali di tahun 2020. Belanja daerah tertinggi dari tahun 2016 – 2020 terjadi di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 sebesar Rp.2.636,89 miliar, sedangkan belanja daerah terendah dari tahun 2016 – 2020 terjadi di Kota Subulussalam pada tahun 2018 sebesar Rp.562,25 miliar Terlihat bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh dari tiap daerahnya berbeda – beda, dimana setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan kepemilikan pendapatan berupa penerimaan daerahnya. Namun, perbedaan kemampuan keuangan tiap daerah akan menciptakan kesenjangan keuangan sehingga dapat membuat perbedaan dalam pembangunan antar daerah (Agussalim, Mar'atus , & Sultan, 2022).

Dari gambar di atas terlihat rendahnya serapan anggaran belanja daerah pada kota yang

ada pada Provinsi Aceh, dimana serapan belanja daerah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam lebih kecil dari serapan belanja daerah pada kabupaten Provinsi Aceh. Rendahnya serapan belanja daerah akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan pada perkotaan di Provinsi Aceh, padahal perkotaan merupakan pusat administrasi yang seharusnya menjadi representatif pada pembangunan suatu daerah. Dimana, menurut Tjiptoherijanto dalam (Herdiana, 2022) mengatakan bahwa berdasarkan fakta di Indonesia dengan adanya pembangunan perkotaan sebagai pusat pemerintah baik tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota akan diikuti oleh pembangunan ekonomi dan pusat perniagaan dalam wilayah tersebut.

Permasalahan muncul ketika suatu daerah memiliki PAD yang rendah sehingga membuat ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas publik karena terbatasnya anggaran yang ada (Laila, Triwahyuningtyas, & Aminda, 2022). Permasalahan ini terjadi kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dimana kontribusi PAD masih tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dalam data laporan kontribusi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh tahun 2016 – 2020 berikut ini.

Grafik 2. Kontribusi Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (Persen)

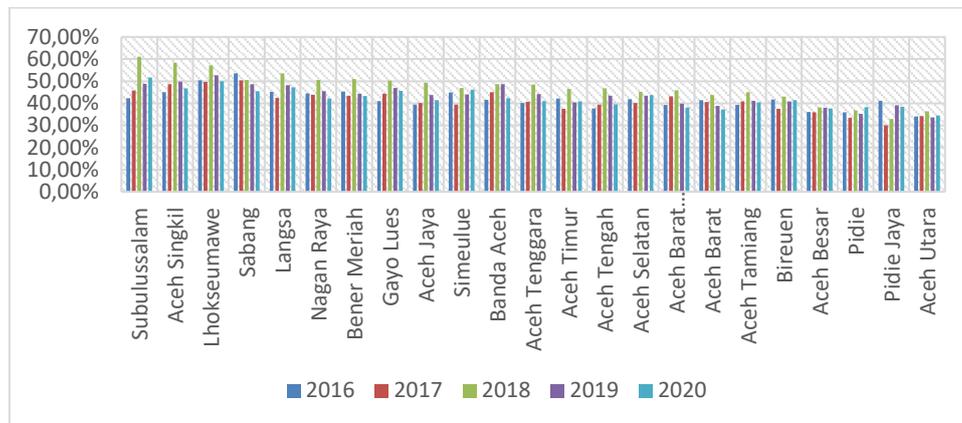


Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022.

Berdasarkan dari gambar di atas bahwa hingga kurun waktu 2020 keterlibatan anggaran ril Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sangatlah rendah, padahal tingkat kemandirian suatu pemerintah dalam pembangunan daerah akan ditentukan oleh besarnya kontribusi PAD yang memadai sehingga pemerintah tidak terus bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat. Pengukuran taraf kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya (Laila, Triwahyuningtyas, & Aminda, 2022). Berdasarkan persentase PAD atas total pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan tiap daerah dapat digolongkan menjadi terlampau rendah (0-25%), rendah (>25-50%), sedang (>50-75%) dan tinggi (di atas 75%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018). Grafik 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh tergolong rendah sekali dengan presentasi dibawah 25 persen tiap tahunnya. Kontribusi PAD tertinggi dari tahun 2016 – 2020 diperoleh Kota Banda Aceh tahun 2017 yakni sebesar 20,58 persen atau senilai 270,17 miliar rupiah, sedangkan kontribusi PAD terendah tahun 2016 – 2020 diperoleh Kabupaten Pidie Jaya tahun 2017 yakni sebesar 3,39 persen atau senilai 47,41 miliar rupiah. Berdasarkan data diatas dalam tahun 2016 – 2020 PAD kabupaten/kota Provinsi Aceh mengalami peningkatan dengan trend yang meningkat. Pendapatan pajak menjadi salah satu sumber utama dari kenaikan PAD, hal ini karna adanya kebijakan pemerintah Aceh dalam mendapatkan sumber PAD yang berasal dari zakat

dimana zakat memiliki potensi yang besar dalam memaksimalkan pendapatan dan penerimaan di provinsi Aceh. Pendapatan zakat didominasi dari penghasilan para PNS dan penghasilan jasa, profesi lainnya yang masih diperselisihkan (Hasibuan, Miksalmina, & Zulkifli, 2021). Walaupun terjadi kenaikan PAD tiap tahunnya, namun PAD pada kabupaten/kota Provinsi Aceh masih tergolong cukup rendah karena dibawah rata – rata nasional. *Tax base* di Aceh sangat kecil sehingga sulit untuk dapat meningkatkan PAD, hal tersebut karena Aceh tidak memiliki industri yang besar yang dapat menyumbangkan ke PAD nya, dimana pajak daerah didominasi oleh pajak kendaraan bermotor padahal sumber pendapatan tersebut bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan pada perubahan kondisi ekonomi.

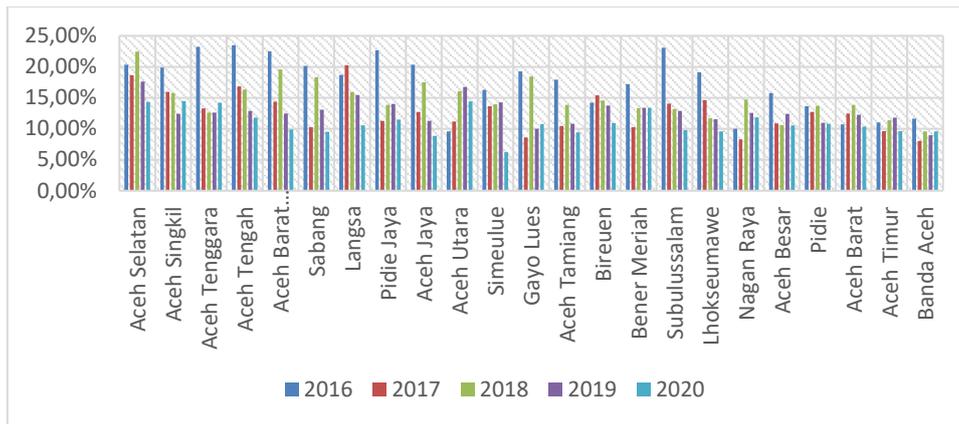
Grafik 3. Kontribusi Realisasi DAU Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022.

Dana Alokasi Umum (DAU) berguna dalam meningkatkan alokasi belanja daerah. DAU menjadi pendanaan, dimana didasarkan pada pendapatan APBN dan menjadi dana paling penting untuk mencukupi kebutuhan daerah, dimana berarti DAU memiliki pengaruh kepada Belanja Daerah. Pada grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan kontribusi DAU pada pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana besarnya kontribusi DAU dari 2016 – 2020 adalah sekitar 30.04 – 61.03 persen. Besarnya kontribusi ini mengindikasikan tidak mandirinya pemerintah daerah berkaitan dengan alokasi dana dari pemerintah pusat. Persentase DAU tertinggi dari tahun 2016 – 2020 diterima oleh Kota Subulussalam pada tahun 2018 yakni sebesar 61.03 persen atau senilai Rp.345.25 miliar rupiah sedangkan persentase DAU terendah diterima oleh Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2017 yakni sebesar 30.04 persen atau senilai Rp.420.52 miliar rupiah. Tingginya kontribusi DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memperlihatkan betapa bergantungnya pemerintah daerah terhadap transfer DAU dari pemerintah pusat.

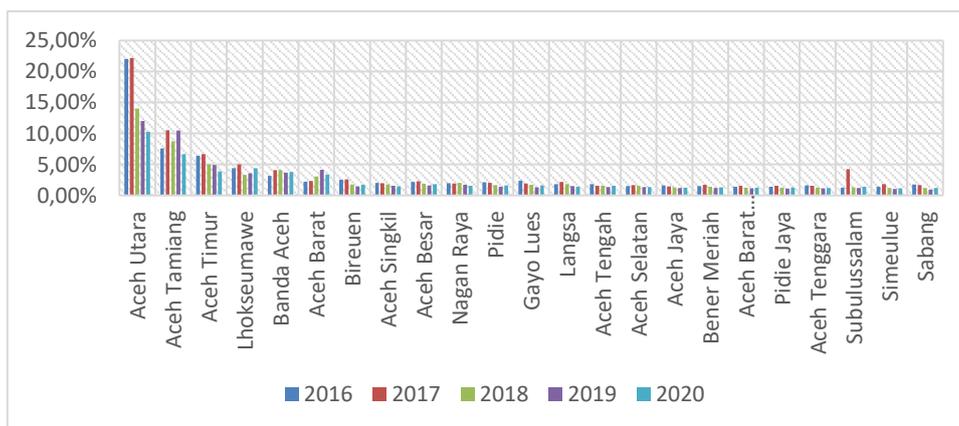
Grafik 4. Kontribusi Realisasi DAK Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk pemberian anggaran aktivitas tertentu yang menjadi tanggung jawab daerah sebagaimana urusan setempat. Terutama dalam hal pembiayaan keperluan fasilitas untuk melayani masyarakat yang kurang meraih batas tertentu atau sebagai pendorong melajunya kemajuan daerah. Pada grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan kontribusi DAK pada pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, namun kontribusi DAK tetap lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi PAD. Adapun besarnya kontribusi DAK dari 2016 – 2020 adalah sekitar 6.21 – 23.48 persen. Besarnya kontribusi ini menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Persentase DAK tertinggi dari tahun 2016 – 2020 diterima oleh Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2016 yakni sebesar 23.48 persen atau senilai Rp.382.8 miliar rupiah sedangkan persentase DAK terendah diterima oleh Kabupaten Simeulue pada tahun 2020 yakni sebesar 6.21 persen atau senilai Rp.56.83 miliar rupiah. Tingginya kontribusi DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menandakan bahwa pemerintah daerah belum mandiri terhadap transfer anggaran alokasi umum dari pemerintah pusat. Bilamana suatu saat anggaran DAK ini dihentikan maka akan merusak jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan di daerah tersebut.

Grafik 5. Kontribusi Realisasi DBH Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2022.

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai anggaran yang bermula atas pemasukan APBN yang disalurkan untuk daerah atas dasar penilaian dalam pendanaan keperluan daerah. Dana Bagi Hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah memiliki dua tipe, yakni DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Anggaran tersebut ditujukan guna upaya meminimalisir ketidakseimbangan fiskal vertikal diantara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah. Kontribusi DBH tahun 2016 – 2020 terbilang kecil yakni sekitar 0.94 – 22.18. Pada Grafik 1.5 dapat dilihat bahwa kontribusi DBH cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal tersebut belum searah terkait penelitian yang diselesaikan Yuliana dkk (2017) berpengaruh signifikan positif kepada belanja daerah

Berdasarkan uraian diatas mengenai masalah, fenomena, teori hingga data yang dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh perumusan masalahnya yaitu bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, serta apakah terjadi flypaper effect atas belanja daerah tersebut?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Peacock dan Wiseman mengatakan pendapat lain saat menjelaskan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada suatu analisis pada penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan pada pembesaran penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak tertentu, yakni kapasitas untuk memahami tingkat perpajakan yang diperlukan pemerintah untuk mendukung pengeluarannya. Karenanya masyarakat lebih bersedia untuk membayar pajak setelah mereka menyadari bahwa pemerintah membutuhkan biaya guna menjalankan aktivitas pemerintah. Peningkatan penerimaan juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah (Peacock & Wiseman, 1961). Karenanya, apabila pajak daerah mengalami peningkatan maka PAD akan meningkat, dan sebagai akibatnya belanja daerah juga akan ikut meningkat.

Teori Keagenan

Jensen and Meckling (1976), berpendapat jika keagenan merupakan suatu perjanjian dari prinsipal dengan agen dan berdasarkan pada perwakilan berbagai hak atas memutuskan persoalan terhadap agen. Pada lingkup keagenan, pemerintah pusat berperan menjadi principal dan kepala pemerintah daerah sebagai agen. Terdapat hubungan antara keduanya dalam hal penyaluran dana perimbangan. Pemerintah pusat sebagai principal hanya menyalurkan anggaran perimbangan guna mendorong pemerintah sebagai pelaksanaan roda pemerintahannya sendiri. Kemudian, anggaran perimbangan yang diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah selaku agen akan dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat selaku kepala (Fadilah & Nayang, 2020).

Teori Flypaper Effect

Courant, Gramlich, dan Rubinfeld memperkenalkan istilah *flypaper effect* pertama kali pada tahun 1979, dimana istilah tersebut dipakai saat memaparkan pendapat Arthur Okun (1930) tentang “*money sticks where it hits*” yang memaparkan bahwa bagaimana lalat yang terletak dalam kertas lalat, sama halnya uang juga terletak dalam tempatnya (Courant, Gramlich, & Rubinfeld, 1979). Menurut Oates, flypaper effect adalah kondisi saat hasil belanja daerah memiliki ukuran lebih dibandingkan transfer dan pendapatannya sendiri (Oates, 1999). Flypaper effect merupakan penyimpangan relasi pemindahan dana keuangan pemerintah pusat dan penghasilan atau pembiayaan pada pemerintah daerah. Flypaper effect muncul apabila pemerintah daerah mendapatkan grant, lalu digunakan sebagai peningkatan pembiayaan serta belanjanya tanpa peningkatan penghasilan ril daerah tersebut.

Sederhananya, Flypaper effect diartikan sebagai perilaku menyimpang di mana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi pemasukan jalan lain untuk publik di daerah (Ginting, 2019).

Pendeteksian flypaper effect atas belanja daerah dilakukan melalui perbandingan pengaruh DAU, DAK, dan DBH dengan pengaruh PAD kepada belanja dalam regresi tunggal maupun regresi berganda (Armawaddin, Rumbia, & Afiat, 2017). Dalam regresi tunggal, koefisien regresi, nilai *t-statistic*, R , R^2 , *adjusted R²* dari setiap variabel (regresi) diibandingkan antara DAU, DAK, serta DBH dengan PAD. Sedangkan dalam regresi berganda, diibandingkan koefisien regresi pada setiap variabel. Adapun ketentuan kondisi *flypaper effect* yaitu (i) jika pengaruh (nilai koefisien) anggaran pemindahan dana (DAU, DAK, dan DBH) kepada belanja daerah berjumlah lebih dibandingkan pengaruh PAD serta masing-masing bersifat signifikan, atau (ii) nilai koefisien PAD tidak signifikan, sehingga disimpulkan mengalami flypaper effect. Asumsi tentang penetapan keadaan *flypaper effect* yaitu melalui memposisikan antara efek penghasilan ril daerah dan anggaran pemindahan dana (DAU, DAK, dan DBH) pada belanja daerah.

Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut beberapa jurnal atau penelitian yang berkaitan pada topik Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah:

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Alat Uji	Variabel	Hasil/Kesimpulan	
1	Yuliana dkk (2017) Fenomena Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan	• 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan • Analisis Regresi Berganda	Dana Bagi Hasil	Berpengaruh signifikan positif	
			Dana Umum	Alokasi	Berpengaruh signifikan positif
			Dana Khusus	Alokasi	Berpengaruh signifikan
			Pendapatan Daerah	Asli	Berpengaruh signifikan positif
2	Utami & Iskandar (2020) <i>Flypaper Effect</i> Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (<i>Two Stage Least Square</i>)	• 34 Provinsi di Indonesia • Analisis <i>Two Stage Least Square</i>	Pendapatan Daerah	Asli Berpengaruh signifikan positif	
			PDRB Per Kapita	Berpengaruh signifikan positif	

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Alat Uji	Variabel	Hasil/Kesimpulan
			Jumlah Penduduk	Berpengaruh signifikan positif
			Dana Perimbangan	Berpengaruh signifikan positif
			Pendapatan Asli Daerah (<i>herfindahl concentration taxes</i>)	Berpengaruh negatif
			Dana Perimbangan (DAU)	Berpengaruh signifikan positif
3	Pratami & Dwirandra (2017) Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, Dan PDRB Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Bali • Regresi Linier Berganda 	Dana Perimbangan (DAK)	Berpengaruh negatif
			Dana Perimbangan (DBH)	Berpengaruh negatif
			Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Berpengaruh positif
			Produk Domestik Regional Bruto	Berpengaruh positif
4	Sagoe & Tingum (2021) Flypaper Effect of Intergovernmental Transfers and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Governments in the Central Region of Ghana	<ul style="list-style-type: none"> • 17 local governments in Ghana from 2008 to 2015 • Panel data estimation techniques and the Generalized Least Squared (GLS) method. 	Transfer Fund	Positive and significant effect
			Own Revenue	Positive and significant effect
5	Mamaradlo, Tang & Wong (2021) Grant Effects on Public Finance for Local Governments with Self-selection Behavior	<ul style="list-style-type: none"> • All Philippine cities and municipalities between 1993 and 2016 • OLS and LGU fixed effects, 	The intergovernmental grant	Positive and significant effect
			Tax Revenue	Positive and significant effect

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah variabel X mempengaruhi variabel Y atau variabel X tidak mempengaruhi variabel Y, dapat digambarkan sebagai berikut:

- H₁: Diduga Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
- H₂: Diduga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
- H₃: Diduga Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
- H₄: Diduga Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
- H₅: Diduga terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian yaitu pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh dengan variabel dependennya adalah belanja daerah, dan belanja independennya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Metode pengambilan sampel ialah dengan *purposive sampling*. Sampel yang dipakai ialah data panel yang terdiri dari *cross section* dan *time series*, dimana mencakup delapan belas kabupaten serta lima kota pada Provinsi Aceh dikali dengan banyaknya tahun yaitu lima tahun yang diambil dari tahun 2016 – 2020, sehingga jumlah observasi secara keseluruhan yaitu sebanyak 115 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai berjenis data sekunder yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2016 – 2020. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Aceh melalui *official website* <https://aceh.bps.go.id/>. Teknik dokumentasi dipilih guna menyalin data terkait atas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2016 – 2020 ke dalam Microsoft Excel untuk memudahkan pengolahan dalam program Software EViews 12. Selain itu, studi kepustakaan dipakai guna mengakumulasi informasi dan data yang berasal dari literatur berupa buku, jurnal, website.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang diandalkan dalam hal ini, yaitu estimasi data panel yaitu model ekonometri yang menyatukan antara deret waktu (*time series*) juga data kerat lintang (*cross section*). Persamaan regresi data panel linear berganda adalah sebuah model yang menganalisis kaitan variabel dependen dimana tidak hanya satu variabel independen (Ghozali & Ratmono, 2017). Analisis regresi linier berganda dilakukan guna mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas (X₁, X₂, X₃ dan X₄) terhadap variabel terikat (Y). Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan stata 12 dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- BD = Belanja Daerah
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- DBH = Dana Bagi Hasil

ε = *Distubance Error* (faktor pengganggu/residual)
 i = *Cross Section* pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
 t = *Time Series* dalam tahun 2016 – 2020

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Jarque-Bera	0.668661
Probability	0.715817

Sumber: Hasil olah Eviews12

Hasil dalam Tabel 2 memperlihatkan Prob Jarque-Bera sebesar $0.715817 > 0.05$, residual normal berarti data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

	PAD	DAU	DAK	DBH
PAD	1.00000	0.80647	0.53185	0.49463
DAU	0.80647	1.00000	0.73951	0.43568
DAK	0.53185	0.73951	1.00000	0.28763
DBH	0.49463	0.43568	0.28763	1.00000

Sumber: Hasil olah Eviews12

Tabel uji diatas memperlihatkan apabila hubungan setiap variabel independent tidak lebih dari 0.89, maka pada model regresi ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Prob.
C	0.0052
PAD	0.4683
DAU	0.8931
DAK	0.6098
DBH	0.8463

Sumber: Hasil olah Eviews12

Tabel uji diatas menunjukkan data dalam penelitian ini, yakni PAD, DAU, DAK, dan DBH terdapat nilai probabilitas lebih tinggi dari 0.05 (α) maka variabel ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson stat</i>	2.356217
---------------------------	----------

Sumber: Hasil olah Eviews12

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji yang diperoleh atas DW adalah 2.356217 dengan jumlah variabel independent (k) tiga, jumlah observasi (n) 115 dan dengan $\alpha = 0.05$. Sehingga diperoleh nilai *Durbin Watson Lower* (d_L) sebesar 1.6246, lalu nilai *Durbin Watson Uper* (d_U) sebesar 1.7683, kemudian nilai $4 - d_U$ sebesar 2.2317 dan $4 - d_L$ sebesar 2.3754. Maka berdasarkan hasil uji yang diperoleh, terlihat nilai DW memenuhi kriteria $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ atau tidak terdapat masalah autokorelasi negatif.

**Teknik Penentuan Model
 Uji Lagrange Multiplier**

Tabel 7. Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	18.14576 (0.0000)	114.3600 (0.0000)	132.5058 (0.0000)

Sumber: Hasil olah Eviews12

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai statistik Lagrange Multiplier < nilai Chi-Square sehingga model terbaik yang digunakan dalam hal ini adalah *Random Effect Model*.

Model Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-268.0955	58.51384	-4.581746	0.0000
PAD	0.594953	0.286549	2.076268	0.0402
DAU	2.286152	0.163975	13.94210	0.0000
DAK	0.873476	0.175039	4.990194	0.0000
DBH	1.321055	0.408017	3.237744	0.0016

Sumber: Hasil olah Eviews12

Terdapat persamaan regresi data panel berdasarkan dalam hasil penjabaran sebelumnya, yakni:

$$BD = -268.0955 + 0.594953PAD + 2.286152DAU + 0.873476DAK + 1.321055DBH$$

Dari persamaan regresi data panel tersebut, didapatkan beberapa penjelasan, seperti:

- a. Nilai kesamaan diatas memperlihatkan sebanyak -268.0955 , hal ini mengartikan bahwa apabila variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH bernilai sama, akan menurunkan nilai dari variabel Belanja Daerah sebanyak 268.0955.

- b. Koefisien regresi dari variabel PAD menjadi sebanyak 0.594953, hal ini mengartikan apabila tiap perubahan satu satuan variabel PAD dapat meningkatkan Belanja Daerah sebanyak 0.594953.
- c. Koefisien regresi dari variabel DAU menjadi sebanyak 2.286152, hal ini mengartikan apabila tiap perubahan satu satuan variabel DAU dapat meningkatkan Belanja Daerah sebanyak 2.286152.
- d. Koefisien regresi dari variabel DAK menjadi sebanyak 0.873476, hal ini mengartikan apabila tiap perubahan satu satuan variabel DAK dapat meningkatkan Belanja Daerah sebanyak 0.873476.
- e. Koefisien regresi dari variabel DBH menjadi sebanyak 1.321055, hal ini mengartikan apabila tiap perubahan satu satuan variabel DBH dapat meningkatkan Belanja Daerah sebanyak 1.321055.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 9. Uji t

Variable	t-Statistic	Prob
C	-4.581746	0.0000
PAD	2.076268	0.0402
DAU	13.94210	0.0000
DAK	4.990194	0.0000
DBH	3.237744	0.0016

Sumber: Hasil olah Eviews12

- a. Pengujian terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Dari hasil regresi yang diperoleh memperlihatkan apabila PAD memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.076268 > 1.981765282$ dan probabilitas $0.0402 < 0.05$, dimana menandakan secara statistik H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dirangkum menjadi PAD memiliki pengaruh kepada belanja daerah.
- b. Pengujian terhadap variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
 Dari hasil regresi yang diperoleh memperlihatkan apabila DAU memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $13.94210 > 1.981765282$ dan probabilitas $0.0000 < 0.05$, dimana menandakan secara statistik H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dirangkum menjadi DAU memiliki pengaruh kepada belanja daerah.
- c. Pengujian terhadap variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)
 Dari hasil regresi yang diperoleh memperlihatkan apabila DAK memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4.990194 > 1.981765282$ dan probabilitas $0.0000 < 0.05$, dimana menandakan secara statistik H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga dirangkum menjadi DAK memiliki pengaruh kepada belanja daerah.
- d. Pengujian terhadap variabel Dana Bagi Hasil (DBH)
 Dari hasil regresi yang didapat memperlihatkan apabila DBH memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3.237744 > 1.981765282$ dan probabilitas $0.0016 < 0.05$, dimana menandakan secara statistik H_0 ditolak dan H_4 diterima, sehingga dirangkum menjadi DBH memiliki pengaruh kepada belanja daerah.

Uji F

Tabel 10. Uji F

F-statistic	250.3193
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah Eviews12

Nilai F_{tabel} ($df_1 = 4, df_2 = 110$) yang diperoleh adalah 2.45421339, maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $250.3193 > 2.45421339$ dan probabilitas $< \alpha$ atau $0.000000 < 0.005$. Sehingga secara statistik H_0 ditolak dan jika dirangkum menjadi seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan kepada variabel dependen

Uji R-Squared dan Adjusted R-Squared

Tabel 11. Uji R-Squared dan Adjusted R-Squared

R-squared	0.901015
Adjusted R-squared	0.897415

Sumber: Hasil olah Eviews12

Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, nilai R-Squared diperoleh sebanyak 0.901015, dimana memperlihatkan apabila variabel dependen yakni belanja daerah mampu diperjelas oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH sebanyak 90.10% dan sisanya 0.80% variabel belanja daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam hal ini. Kemudian, diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.897415, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini menjelaskan pengaruhnya atas variabel dependen sebanyak 89.74%, sehingga sisanya yakni 10.26% dipengaruhi variabel independen lainnya yang tidak disebutkan dalam hal ini.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dimana mengartikan bahwa PAD memiliki pengaruh kepada belanja daerah. Selama lima tahun terakhir sejak 2016 – 2020 tingkat realisasi PAD selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pendapatan pajak menjadi salah satu sumber utama dari kenaikan PAD, hal ini karna adanya kebijakan pemerintah Aceh dalam mendapatkan sumber PAD yang berasal dari zakat dimana zakat memiliki potensi yang besar dalam memaksimalkan pendapatan dan penerimaan di provinsi Aceh. Pendapatan zakat didominasi dari penghasilan para PNS dan penghasilan jasa, profesi lainnya yang masih diperselisihkan (Hasibuan, Miksalmina, & Zulkifli, 2021). Walaupun terjadi kenaikan PAD tiap tahunnya, namun PAD pada kabupaten/kota Provinsi Aceh masih tergolong cukup rendah karena dibawah rata – rata nasional. Tax base di Aceh sangat kecil sehingga sulit untuk dapat meningkatkan PAD, hal tersebut karena Aceh tidak memiliki industri yang besar yang dapat menyumbangkan ke PAD nya, dimana pajak daerah didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang mana sumber pendapatan tersebut bersifat closed list dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan pada perubahan kondisi ekonomi.

Penghasilan ril daerah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016 sebesar 377.26 miliar. Besarnya PAD yang dimiliki oleh Aceh Utara terjadi karena Aceh Utara didominasi oleh empat sektor utama yakni sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 34 persen, pertambangan penggalan sebesar 17.6 persen,

industri pengolahan sebesar 8.96 persen dan perdagangan besar 12.31 persen. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Utara yang industrinya cenderung maju, serta banyaknya keberagaman alam lebih condong mendapatkan ukuran yang lebih besar dari PAD dibandingkan pada daerah lainnya di Provinsi Aceh. Lalu, penghasilan ril daerah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh terkecil berada pada Kota Subulussalam di tahun 2018 sebanyak 38.96 miliar rupiah, rendahnya PAD Kota Subulussalam dikarenakan lemahnya pihak Dispenda dalam melakukan sosialisasi kepada semua sektor sumber PAD seperti perhotelan, restoran, café, dll. Dimana dalam penelitian yang dilakukan BPI KPNPA RI Kota Subulussalam didapati dugaan jika pengusaha hotel maupun perusahaan enggan mengurus izin dan hak guna usaha nya guna menghindari pajak daerah.

Penelitian ini memiliki arah yang sama dengan penelitian yang lebih awal, dimana dalam penelitian Sagoe and Tingum (2021) yang menyatakan apabila PAD memiliki pengaruh signifikan positif kepada belanja daerah. Karenanya, berdasarkan temuan penelitian sebagaimana hipotesis dan teori yang digunakan menyatakan bahwa ketika realisasi atas kenaikan nilai PAD diiringi dengan kenaikan nilai belanja daerah. Dalam hal lainnya, melajunya dana belanja sebuah daerah akan beriringan dengan melajunya PAD yang wajib dimiliki setiap daerah itu. Peningkatan nilai PAD di kabupaten/kota Provinsi Aceh memperlihatkan tentang hasil kerja daerah dalam usaha menggali potensi yang dimiliki pada daerahnya. Kondisi tersebut merupakan dampak dari diterapkannya desentralisasi daerah yang memaksa pemerintah daerah menjadi tidak bergantung terhadap pemerintah pusat.

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, dimana mengartikan bahwa DAU memiliki pengaruh kepada belanja daerah. Besaran Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh terbilang cukup tinggi jika disandingkan oleh penghasilan ril daerahnya. Alasannya adalah bagi Aceh, Dana Otonomi Khusus seperti DAU pada prinsipnya ialah bagian dari kebijakan desentralisasi asimetris yang baru dikenal setelah disahkannya UU 18 Tahun 2001. Penting diketahui bahwa Dana Otonomi Khusus hanya diberikan pada provinsi yang didasarkan pada status kekhususannya seperti Aceh. Setelah tsunami Aceh tahun 2004, penambahan dan perbaikan atas kekhususan Aceh diwujudkan melalui pengesahan UU 11 Tahun 2006. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh ditujukan untuk membiayai pembangunan dan memelihara infrastruktur, selain itu juga untuk memampukan ekonomi, menghapus kemiskinan, menaikkan pendidikan, sosial, serta Kesehatan (Kementerian Keuangan, 2022). Melihat kondisi Aceh yang merupakan daerah khusus dan juga merupakan provinsi termiskin sejak 2002 maka pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang besar sebagai pengembangan desentralisasi fiskal daerah tersebut. Karena itu, harusnya pemberian dana alokasi umum ini dapat mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh namun jika dilihat dari data BPS hingga 2020 Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Tingginya kemiskinan yang ada di Aceh terjadi karena persoalan tata kelola pembangunan di daerah. Ketergantungan akan dana alokasi umum membuat pemerintah daerah tidak memperhatikan tata kelola pembangunan dengan baik dan kurang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemic Covid 19 menyebabkan terjadinya penundaan penyaluran DAU, dimana pada Provinsi Aceh terdapat 21 Kabupaten/kota atau 87.5% DAU mendapat penundaan penyaluran dari kemenkeu. Penelitian ini memiliki arah yang sama dengan penelitian yang lebih awal, yakni penelitian Syahrina dan Ermawati (2020) yang memaparkan apabila DAU memiliki pengaruh signifikan positif kepada belanja daerah. Berdasarkan temuannya yang sesuai dengan hipotesis dan teori yang digunakan bahwa dalam hal ini secara nyata dibuktikan apabila belanja daerah yang besar adalah atas dasar jumlah DAU yang didapatkan melalui

pemerintah pusat. Kondisi tersebut memperlihatkan apabila masih tingginya ketidakmandirian pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh kepada pemerintah pusat

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, dimana mengartikan bahwa DAK memiliki pengaruh kepada belanja daerah. Artinya, tingginya DAK di pemerintah daerah beriringan dengan menaikkan belanja daerahnya. Alasannya adalah DAK menjadi anggaran yang dialokasikan pada sebuah daerah guna melaksanakan pembantuan pembiayaan keperluan utama, dengan mengutamakan anggaran pada APBN, sehingga menyebabkan tiap daerah cenderung berbeda pada taraf ukuran penghasilan dana alokasi tertentu. Hingga tahun 2022, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi se-Indonesia diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara. Dimana, dana tersebut ditujukan sebagai bentuk pembantuan pembiayaan aktivitas utama, dimana menjadi kewenangan daerah sebagaimana harapan utama nasional, yaitu bidang pembangunan diantaranya adalah sektor pendidikan, Kesehatan, dan keluarga berencana (KB). Penelitian ini memiliki arah sama dengan penelitian yang lebih awal, yakni penelitian Nugroho (2017) yang menyebutkan apabila DAK memiliki pengaruh signifikan positif kepada belanja daerah. Alasannya adalah DAK yang digunakan dalam memberikan upaya melayani masyarakat dan kehadiran fasilitas yang mumpuni menjadikan setiap investor berminat dalam penanaman modal di daerah yang ada. Dengan hal tersebut, secara tidak langsung dapat menaikkan penghasilan daerah untuk kemudian membuat daerah berpeluang menjadi berkembang semakin besar.

Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, dimana mengartikan bahwa DAK memiliki pengaruh kepada belanja daerah. Diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 nilai realisasi DBH cenderung mengalami penurunan yang diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus menurun pada tahun – tahun mendatang, belum ada lagi nya sumber – sumber dari ladang minyak dan gas yang baru membuat perolehan dana bagi hasil Provinsi Aceh menjadi menurun. Penelitian ini memiliki arah yang sama terkait penelitian yang lebih awal oleh Yuliana dkk (2017) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif kepada belanja daerah. Alasannya adalah adanya perbedaan dalam hal potensi keuangan yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang menyebabkan berbeda pula DBH pada setiap kabupaten/kota. Output dari penghasilan DBH mampu dimanfaatkan pada menaikkan pembangunan dan kesejahteraan setiap daerah. Pembangunan pembiayaan yang berbeda dan berkaitan pada pengaturan potensi daerah akan membawa dampak pada belanja daerah yang besar. Hal ini membuat DBH yang diperoleh menjadi besar dan diiringi belanja daerah yang menjadi besar pula.

Analisis Terjadinya Flypaper Effect Atas Belanja Daerah

Tabel 12. Hasil Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-268.0955	58.51384	-4.581746	0.0000
PAD	0.594953	0.286549	2.076268	0.0402
DAU	2.286152	0.163975	13.94210	0.0000

DAK	0.873476	0.175039	4.990194	0.0000
DBH	1.321055	0.408017	3.237744	0.0016

Sumber: Hasil olah Eviews12

Dari penjabaran sebelumnya, diketahui apabila efek terkait DAU, DAK, serta DBH kepada belanja daerah berukuran lebih dibandingkan efek PAD kepada belanja daerah. Hal ini terlihat dari masing – masing koefisien dari PAD, DAU, DAK, dan DBH, dimana koefisien DAU berukuran lebih dibandingkan PAD ($2.286152 > 0.594953$), kemudian koefisien DAK lebih besar dari PAD ($0.873476 > 0.594953$), dan Koefisien DBH lebih besar dari PAD ($1.321055 > 0.594953$). Kondisi ini menunjukkan bahwa H_5 diterima maka terdapat *flypaper effect* atas belanja daerah yang berasal dari DAU, DAK dan DBH di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini searah dengan teori Oates, dimana mengatakan bahwa *flypaper effect* adalah keadaan saat jawaban menunjukkan nilai lebih besar terhadap belanja daerah dari pemindahan dana dibandingkan pendapatannya sendiri (Oates, 1999). Hal ini searah pula dengan penelitian Ansori dan Muthmainah (2018) yang telah membuktikan keadaan *flypaper effect* atas belanja daerah.

5. SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah karena PAD menjadi acuan utama pengeluaran pembangunan daerah yang digunakan dalam rangka peningkatan serta pemerataan kemakmuran masyarakat, sehingga jika PAD sudah dimaksimalkan maka akan membuat belanja daerah semakin meningkat. Kemudian, adanya pengaruh antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah karena tujuan dari pemberian dana transfer berupa DAU sebagai pendukung keberadaan anggaran untuk pemenuhan keperluan belanja daerah, karenanya meningkatnya DAU akan membuat belanja daerah menjadi meningkat pula. Terdapat pula pengaruh antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah karena DAK menjadi acuan penerimaan yang dikelola dari APBN untuk daerah sebagai bentuk pembiayaan keperluan utama yang menjadi kepentingan pemerintah daerah dan harapan utama negara. Berbicara mengenai dana belanja modal, DAK memiliki pengaruh sebab lebih condong dimanfaatkan dalam penambahan aset tetap dari pemerintah sebagai peningkatan layanan masyarakat. Karenanya, peningkatan Dana Alokasi Khusus yang berjumlah lebih dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan belanja modal dalam belanja daerah, untuk kemudian dapat dirangkum jika Dana Alokasi Khusus berkaitan dengan belanja daerah. Lalu, terdapat dampak antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah karena output dari penghasilan DBH mampu dimanfaatkan sebagai peningkatan pembangunan dan kemakmuran setiap daerah. Pembangunan dan pembiayaan lain yang berhubungan dengan pengaturan kekayaan daerah dapat menyumbang dampak kepada ukuran belanja daerah yang besar. Hal ini membuat besarnya DBH dan diiringi belanja daerah yang besar pula. Dan terakhir, terjadi fenomena *flypaper effect* atas belanja daerah sebab belanja daerah direspon lebih besar oleh dana transfer, yakni DAU, DAK dan DBH daripada PADnya. Hal ini terbukti dari koefisien regresi DAU, DAK, dan DBH yang lebih besar dibanding

koefisien regresi PAD.

Melalui penelitian ini, ditemukan apabila telah muncul keadaan flypaper effect atas belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dimana pembiayaan untuk belanja daerahnya masih direspon besar oleh DAU, DAK, dan DBH daripada PAD nya. Hal ini membuat pemerintah daerah Provinsi Aceh belum mandiri terhadap bergantung pada dana traanggaran pemindahan dana dari pemerintah pusat. Adapun saran yang direkomendasikan adalah pemerintah daerah Provinsi Aceh sebaiknya memaksimalkan belanja yang menghadirkan peluang penghasilan dari suatu daerah dalam konteks berkelanjutan lewat penemuan serta pemajuan kemampuan-kemampuan masing-masing daerah sehingga membuat peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi sumber – sumber PAD

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Mar'atus , & Sultan. (2022). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh 2013-2017. 15.
- Chadiza, N., & Syahnur, S. (2022). Flypaper Effect Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*.
- Courant, P. N., Gramlich, E., & Rubinfield, D. (1979). *The Stimulative Effects Of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits*.
- Fadilah, H., & Nayang, H. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No 3, Hal 3144-3159.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit - Undip.
- Hasibuan, D., Miksalmina, & Zulkifli. (2021). Zakat Sebagai Sumber Peningkatan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*.
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik. *Jurnal Transformative*.
- Kementerian Keuangan. (2022). Bagaimana Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. *Kemenkeu*.
- Laila, H., Triwahyuningtyas, N., & Aminda, R. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 198.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*.

Peacock, A., & Wiseman, J. (1961). The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. *The Economic Journal*.

Septriani, Armelly, Ekaputri, R., & Pasaribu, E. (2020). Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu. *Akuntabilitas*, 34.

Utami, S., & Iskandar, D. D. (2020). Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square). *Dinamika Ekonomi Pembangunan*.